

PERKEMBANGAN MYANMMAR SEJAK MASA PERGERAKAN SAMPAI KEHIDUPAN DEWASA INI

Nova WulanSari¹, Lisa Puspita², M. Arifin Akbar³

(¹PENSA FKIP Universitas jambi)

(²PENSA FKIP Universitas jambi)

(³PENSA FKIP Universitas jambi)

Alamat e-mail : (¹novawulansari0205@gmail.com), (²lisapuspita772@gmail.com),
(³marifinakbar0110@gmail.com)

ABSTRACT

Myanmar is a Southeast Asian country that has experienced complex political dynamics from the colonial period to the modern era, particularly in civil–military relations. Since gaining independence in 1948, Myanmar has been unable to escape the dominance of the military (Tatmadaw), which has repeatedly intervened in politics through coups in 1962, 1988, and 2021. This study aims to analyze the development of democracy in Myanmar and the influence of military dominance in the political transition process from the colonial era to the 2021 coup. The method used is library research with a descriptive qualitative approach, drawing on various scholarly sources such as books, journals, and research reports. This study employs Samuel P. Huntington’s civil–military relations theory and Robert A. Dahl’s theory of democracy as its analytical framework. The findings indicate that democratization in Myanmar has been unstable due to weak civilian control over the military. Although political reforms and democratic elections were held in 2010, 2015, and 2020, the military continued to maintain significant influence through the 2008 Constitution and direct intervention in governance. The coup on 1 February 2021, led by General Min Aung Hlaing, marked a turning point that halted democratization and triggered prolonged political, social, and humanitarian crises. Until today, Myanmar remains in a stagnant condition characterized by strong military dominance and weak civilian supremacy. It can therefore be concluded that the failure of democratic consolidation in Myanmar is primarily caused by the persistent and dominant role of the military within the state’s political structure.

Keywords : Myanmar, Democracy, Military

ABSTRAK

Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara yang sejak masa kolonial hingga era modern mengalami dinamika politik yang kompleks, terutama dalam hubungan antara pemerintahan sipil dan militer. Sejak kemerdekaan pada tahun 1948, Myanmar tidak dapat melepaskan dominasi militer (Tatmadaw) yang berulang kali melakukan intervensi politik, termasuk kudeta pada tahun 1962, 1988, dan 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan demokrasi di Myanmar

serta pengaruh dominasi militer dalam proses transisi politik dari masa kolonial hingga kudeta 2021. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Kajian ini menggunakan teori hubungan sipil-militer Samuel P. Huntington dan teori demokrasi Robert A. Dahl sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Myanmar berlangsung tidak stabil karena lemahnya kontrol sipil terhadap militer. Meskipun sempat terjadi reformasi politik dan pemilu demokratis pada 2010, 2015, dan 2020, militer tetap mempertahankan pengaruh melalui konstitusi 2008 serta intervensi langsung dalam pemerintahan. Kudeta 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing menjadi titik balik yang menghentikan proses demokratisasi dan memicu krisis politik, sosial, dan kemanusiaan yang berkepanjangan. Hingga saat ini, Myanmar masih berada dalam kondisi stagnan dengan dominasi militer yang kuat dan lemahnya supremasi sipil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegagalan konsolidasi demokrasi di Myanmar disebabkan oleh kuatnya peran militer dalam struktur politik negara.

Kata Kunci: Myanmar, Demokrasi, Militer

A. Pendahuluan

Myanmar merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang pernah berada di bawah kekuasaan Inggris sejak abad ke-19. Sebelum kolonisasi berlangsung, Inggris telah hadir di wilayah Myanmar sejak tahun 1750-an melalui aktivitas perdagangan di Cape Negrais. Meskipun sempat menghadapi berbagai hambatan, Inggris terus memperluas pengaruhnya hingga akhirnya menjadikan Myanmar sebagai bagian dari wilayah kolonialnya. Selain dikenal sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, Myanmar juga dikenal karena dominasi junta militer dalam sistem

pemerintahannya. Selama bertahun-tahun, pemerintahan militer menerapkan kontrol yang ketat terhadap masyarakat dan sering dikaitkan dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memicu kecaman internasional dan sanksi ekonomi.

Secara geografis, Myanmar berbatasan dengan India, Tiongkok, Thailand, Laos, dan Bangladesh serta memiliki garis pantai yang panjang dan sumber daya alam yang melimpah. Letaknya yang strategis menjadikan Myanmar penting secara ekonomi dan geopolitik sejak masa kolonial. Dalam konteks politik, Myanmar menjadi sorotan

internasional karena dinamika hubungan sipil-militer yang memengaruhi perkembangan demokrasi. Menurut Huntington, hubungan sipil-militer yang ideal terwujud ketika pemerintahan sipil mampu mengendalikan militer tanpa mengurangi profesionalismenya. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercapai di Myanmar karena militer masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan politik negara

Perebutan kekuasaan dan perang saudara yang mewarnai dinamika di Myanmar. Pada masa Kerajaan Ava, hubungan antara Inggris dan Myanmar sudah terjalin, yang berkaitan dengan perdagangan. karena posisi Myanmar yang sangat dekat dengan India, Inggris memiliki trad ing station di kawasan pesisir Myanmar. Kecurigaan terhadap Inggris mendorong kerajaan untuk menyerang Cape Negriss pada tahun 1759. Seiring berjalanya waktu, Inggris mulai mengembangkan perdagangannya melalui mekanisme imperialisme, terutama dari India. Pada pertengahan 1820-an. Inggris dengan pasukan East India Company melancarkan serangan ke wilayah Rangoon, dipimpin oleh Jendral

Sir Archiblad Campbell. Serangan ini sering disebut the first Anglo-Burmese War, perang yang menghabiskan dana cukup banyak sehingga memberikan krisis ekonomi di British India setelah perang tersebut berlangsung. Pada peperangan ini, pasukan Inggris berhasil menyingkirkan 10.000 pasukan dari Myanmar, termasuk pasukan gajah yang memiliki ketahanan perang sangat tinggi. Hasilnya, Myanmar menyerahkan pesisir Arakan yang terletak di antara Chittagong dan Cape Negriss ke British India . Dari awal, pihak Inggris melihat bahwa selain menjadi hub bagi India dan Singapura, wilayah Myanmar terkenal dengan tanahnya yang subur. Hampir tidak ada berita kelaparan menjangkiti dan lumbung padi selalu terisi penuh (Blair, 1929). Panasnya wilayah tropis tidak terlalu menyengat dan curah hujan yang tinggi, memberikan lanskap yang indah di sepanjang garis pantai Myanmar. Inilah nilai lebih yang kemudian dapat dijadikan landasan bagi Inggris untuk menganeksasi Myanmar.

Perjuangan demokrasi Myanmar semakin menguat melalui gerakan 8888 Uprising pada tahun 1988. Meskipun NLD yang dipimpin Aung

San Suu Kyi memenangkan pemilu 1990, militer menolak mengakui hasil tersebut. Reformasi politik pada 2011 dan kemenangan NLD dalam pemilu 2015 sempat membuka peluang demokratisasi, tetapi proses itu kembali terhenti setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang dipimpin Tatmadaw. Kudeta tersebut mengakhiri transisi demokrasi dan memicu krisis politik serta kemanusiaan yang berkepanjangan¹.

Sejarah Myanmar juga menunjukkan panjangnya perjuangan menuju kemerdekaan. Gerakan nasionalisme muncul pada masa kolonial Inggris dengan dukungan para biksu Buddha dan tokoh-tokoh nasionalis seperti Aung San. Setelah melalui berbagai perjuangan politik dan militer, Myanmar akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 4 Januari 1948²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Kajian dilakukan dengan memanfaatkan teori hubungan sipil-

militer Samuel P. Huntington dan teori demokrasi Robert A. Dahl sebagai kerangka analisis untuk memahami perkembangan demokrasi Myanmar dari masa kolonial hingga kudeta militer tahun 2021.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan dinamika hubungan sipil-militer serta perkembangan demokrasi di Myanmar secara historis dan konseptual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan **Bentuk Pergerakan Nasional Myanmar**

Setelah berakhirnya Perang Inggris–Burma pada abad ke-19, Myanmar berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris yang kemudian

¹ Caillaud, R. (2022). Myanmar's Economy In 2021: The Unravelling Of A Decade Of Reforms. In D. Singh & T. H. Hoang (Eds.), Southeast Asian

Affairs 2022 (Pp. 254–268). ISEAS Publishing.

² Anggarani, M. (2008). Perjuangan Anti Kolonialisme Burma. Jakarta: UI

membentuk sistem administrasi baru di wilayah tersebut. Kehadiran pemerintahan kolonial tidak hanya mengubah struktur politik, tetapi juga berdampak besar terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Burma. Dalam proses ini, banyak penduduk lokal kehilangan akses terhadap posisi politik serta mengalami ketimpangan ekonomi akibat kebijakan kolonial dan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan masyarakat³. Kondisi ketidakadilan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor penting yang memicu munculnya kesadaran politik dan perlawanan terhadap kolonialisme, yang pada akhirnya berkembang menjadi gerakan nasionalisme di Myanmar.

Gelombang nasionalisme di Myanmar mulai menguat setelah Perang Dunia I, terutama ketika Inggris memisahkan Myanmar dari sistem administrasi India. Perang tersebut menjadi momentum penting yang mendorong munculnya kesadaran politik baru di kalangan masyarakat Myanmar. Hal ini terlihat

dari meningkatnya aksi protes di lingkungan universitas. Pada tahun 1921, YMCA Burma berubah menjadi GCBA (General Council of Burmese Associations), yang berkembang menjadi organisasi politik berhaluan nasionalis.

Perubahan kebijakan kolonial Inggris turut memengaruhi dinamika gerakan nasional. Pada tahun 1923, Inggris memperkenalkan sistem dyarchy seperti yang diterapkan di India. Kebijakan ini justru menyebabkan perpecahan dalam tubuh GCBA menjadi dua kelompok, yaitu faksi U Chit Hlaing yang menuntut konsesi lebih besar dan cenderung non-kooperatif, serta kelompok Dua Puluh Satu yang lebih menerima kebijakan Inggris dan siap bekerja sama dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dari perkembangan ini, muncul tokoh-tokoh nasionalis penting seperti Ba Maw, U Ba Pe, U So, serta kemudian U Aung San dan Thakin Nu dari Partai Thakin. Pada awal 1930-an, Komisi Simon mengajukan berbagai usulan reformasi untuk India dan Myanmar,

³ Kikuchi, T. (2022). Creation Of The History Of The Panglong Conference Based On The "National Solidarity"

Image. Southeast Asian Studies, 59(2), 290–320.

namun proposal tersebut kehilangan legitimasi karena dianggap tetap menguntungkan kepentingan kolonial Inggris serta didukung oleh kelompok bisnis, sehingga menimbulkan kecurigaan para nasionalis terhadap niat Inggris mempertahankan kekuasaan di Myanmar.

Sebagai respons, kelompok nasionalis membentuk Liga Anti-Pemisahan. Gerakan ini memperoleh dukungan luas karena mampu mempengaruhi opini publik. Inggris kemudian mengeluarkan kebijakan yang memberikan pilihan apakah Myanmar tetap bersatu dengan India atau memisahkan diri sesuai kehendak nasionalis.

Memasuki awal Perang Dunia II, Jepang mulai memasuki wilayah Myanmar. Pada 18 November 1939, berbagai organisasi seperti All Burma Students' Organization, Partai Sinyetha di bawah Dr. Ba Maw, dan Parakin membentuk Burma Freedom Bloc Organization (BFBO) dengan Aung San sebagai sekretaris jenderal. Organisasi ini bertujuan menekan Inggris agar menetapkan jadwal pasti kemerdekaan Myanmar sebagai bagian dari dinamika perang global.

Menurut Steinberg (2001, hlm. 16–17), BFBO merupakan organisasi

politik yang terstruktur dengan tujuan utama mencapai kemerdekaan penuh. Organisasi ini juga terlibat dalam berbagai aktivitas bawah tanah yang menentang perang kolonial, dengan pandangan bahwa konflik tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat Myanmar. Pemerintah kolonial merespons dengan penangkapan sejumlah pemimpin dan pembatasan aktivitas politik. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi ini bekerja sama dengan kalangan mahasiswa dan tokoh politik lain, serta dipengaruhi oleh ideologi sosialis dan komunisme yang berkembang saat itu. Kelompok ini juga dikenal sebagai Partai Thakin karena anggotanya menggunakan sebutan “thakin” yang berarti “tuan” sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap dominasi kolonial Inggris.

Gerakan mahasiswa kemudian berkembang setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948 hingga awal 1960-an, pada masa pemerintahan U Nu yang berorientasi demokrasi liberal. Periode ini terbagi menjadi dua fase, yaitu 1948–1958 dan 1960–1962, sebelum akhirnya pada 1962 Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan melalui

pemerintahan militer yang cenderung berhaluan sosialis. Meskipun terjadi transisi dari kolonialisme Inggris ke pemerintahan AFPFL setelah kemerdekaan, perubahan signifikan dalam kehidupan mahasiswa tidak sepenuhnya terjadi. Konflik internal di kalangan mahasiswa semakin meningkat dan memperburuk stabilitas sosial. Mereka terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendukung AFPFL dan kelompok minoritas yang mendukung Partai Komunis yang telah dilarang, sehingga menciptakan siklus perpecahan politik yang berkepanjangan ⁴.

Perkembangan Myanmar

Sejarah menyoroti bahwa militer sudah mengambil peran politiknya sejak kemerdekaan. Myanmar Tatmadaw jarang mengalami indoktrinasi dengan konsep profesionalisme militer dan kontrol sipil. Orientasi politik Tatmadaw tidak hanya menjadi tentara dengan citra sosial yang patriotik dan kurangnya indoktrinasi yang tepat tentang profesionalisme

militer dan kontrol sipil tetapi juga situasi politik pada waktu kemerdekaan.

Tatmadaw ditugaskan untuk terlibat secara terus-menerus dalam politik Myanmar dengan alasan stabilitas jangka panjang dan kesatuan militer baik sebagai pemerintah maupun institusi. Pada tahun 1962, perpecahan di antara elit politik, ketegangan antara partai yang berkuasa dan kelompok etnis membuka peluang untuk militer dalam campur tangan dalam politik.

Kudeta militer Myanmar yang dilakukan oleh Tatmadaw pada 1 Februari 2021 menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh National League for Democracy (NLD). Aksi ini terjadi setelah kemenangan besar NLD pada pemilu 2020, namun militer menolak hasil tersebut dengan alasan dugaan kecurangan dan menuntut pemungutan suara ulang. Dalam peristiwa ini, Presiden Win Myint, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah elite politik NLD ditahan, sementara Min Aung Hlaing mengambil alih

⁴Maiwan, M. (2014). Gerakan Mahasiswa Dalam Kemelut Politik Di Myanmar: Pergulatan Mewujudkan

Kebebasan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 13(2), 39–60.

kekuasaan dan menetapkan keadaan darurat yang kemudian diperpanjang hingga 2023⁵.

Kudeta tersebut memicu gelombang protes besar di seluruh Myanmar yang menuntut kembalinya demokrasi. Pemerintah militer merespons dengan pembatasan akses internet, membatasi kerumunan, mengirimkan kendaraan lapis baja, dan menggunakan kekerasan untuk membunuh massa seperti peluru karet, gas air mata, dan peluru tajam. Setahun setelah kudeta, masalah politik Myanmar telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan. Sekitar 1.500 orang tewas dalam protes kudeta, militer menangkap 11.838 penentang, dan 405.700 orang mengungsi dari Februari 2021 hingga Januari 2022, dan diperkirakan 6,2 juta orang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat tahun ini.

Secara historis, Myanmar telah lama mengalami transisi politik yang didominasi militer melalui berbagai reformasi yang bersifat top-down.

Program “Roadmap to Democracy” yang diprakarsai militer bertujuan membangun sistem politik baru, tetapi tetap mempertahankan peran dominan militer dalam struktur negara. Proses ini mencakup penyusunan konstitusi, pemilu, dan pembentukan lembaga legislatif, namun tetap berada dalam kendali militer.

Meskipun terdapat beberapa kemajuan seperti pemilu 2010 dan 2015, keterlibatan oposisi seperti NLD sering dibatasi melalui penahanan dan pembatasan aktivitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa transisi demokrasi di Myanmar lebih banyak dikendalikan oleh militer dibandingkan partisipasi sipil secara penuh.

Tokoh utama dalam kudeta 2021, Min Aung Hlaing, sebagai panglima tertinggi Tatmadaw, memiliki pengaruh besar dalam struktur militer dan politik Myanmar. Ia memandang militer sebagai penjaga stabilitas negara dan menggunakan narasi nasionalisme serta persatuan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Setelah kudeta, ia

⁵ Lidauer, M. (2023). Myanmar's Menu Of Electoral Manipulation: Self- And External Legitimation After The 2021 Coup. *Critical Asian Studies*, 55(3).

memperkuat kontrol politik dengan menempatkan loyalis militer di posisi strategis serta mempertahankan kekuasaan melalui perpanjangan keadaan darurat.

Kudeta ini pada akhirnya memperdalam konflik politik di Myanmar dan memperkuat kembali dominasi militer dalam sistem pemerintahan, sekaligus memicu perlawanan dari berbagai kelompok etnis dan masyarakat sipil yang menolak kembalinya pemerintahan otoriter⁶.

Myanmar Sekarang

Sejak era kolonial Inggris hingga masa kini, Myanmar mengalami dinamika politik yang didominasi oleh tarik-menarik antara aspirasi demokrasi dan kekuatan militer. Setelah merdeka pada 1948, Myanmar beberapa kali mengalami kudeta militer, yaitu pada 1962, 1988, dan 2021, yang menunjukkan kuatnya peran Tatmadaw dalam politik nasional.

Pada masa reformasi, militer tetap mempertahankan pengaruhnya melalui konstitusi 2008 yang memberikan 25% kursi parlemen

kepada militer. Pemilu 2011 dan 2015 sempat membuka ruang demokrasi, dengan kemenangan National League for Democracy (NLD), namun stabilitas ini kembali runtuh setelah kudeta 1 Februari 2021 yang dilakukan Jenderal Min Aung Hlaing dengan menahan pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint atas tuduhan kecurangan pemilu 2020.

Sejak kudeta tersebut, Myanmar berada dalam kondisi krisis berkepanjangan. Pemerintahan militer memberlakukan keadaan darurat, pembatasan kebebasan sipil, serta tindakan represif terhadap demonstran. Situasi ini memicu konflik politik, sosial, dan kemanusiaan yang luas, serta memperkuat perlawanan dari kelompok oposisi dan masyarakat sipil.

Hingga masa sekarang, upaya junta militer untuk mempertahankan kekuasaan dilakukan melalui kontrol politik, rencana pemilu yang dipertanyakan legitimasinya, serta konsolidasi kekuatan di bawah State Administration Council (SAC). Namun, konflik antara militer, kelompok etnis,

⁶ Saputra, A. A., & Dewi, E. (2025). Peranan Militer Dalam Konflik Internal Myanmar Pada Tahun 2017–2022.

Indonesian Journal Of International Relations, 9(1), 80–96.

dan gerakan pro-demokrasi masih terus berlangsung, menjadikan Myanmar sebagai negara dengan transisi demokrasi yang belum terselesaikan dan cenderung stagnan di bawah dominasi militer⁷.

Hubungan Myanmar dengan ASEAN dan Komunitas Global

Kudeta yang dilakukan militer Myanmar memengaruhi koneksi negara tersebut dengan ASEAN serta dunia internasional. ASEAN berusaha melakukan mediasi melalui Konsensus Lima Poin, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Banyak negara anggota ASEAN berpendapat bahwa pemerintah militer Myanmar tidak menunjukkan niat yang baik dalam mendukung perdamaian dan demokrasi.

Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan sanksi ekonomi terhadap pemerintahan militer Myanmar. Di sisi lain, China dan Rusia memilih untuk menjaga hubungan strategis dengan

Myanmar, terutama dalam aspek perdagangan dan keamanan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa Myanmar berperan penting dalam persaingan geopolitik di kawasan Asia Tenggara⁸.

D. Kesimpulan

Dinamika demokrasi di Myanmar menunjukkan bahwa proses demokratisasi di negara tersebut berlangsung tidak stabil dan berulang kali mengalami kemunduran akibat dominasi militer (Tatmadaw) dalam kehidupan politik. Sejak memperoleh kemerdekaan, Myanmar belum mampu membangun hubungan sipil–militer yang seimbang. Militer tidak hanya berperan sebagai institusi pertahanan, tetapi juga menjadi aktor politik utama yang secara langsung maupun tidak langsung.

Berbagai upaya transisi menuju demokrasi, seperti pemilu 1990, 2015, dan 2020, tidak menghasilkan konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan karena hasil pemilu sering kali tidak diakui atau dibatalkan

⁷ Rugian, F. E., Niode, B., & Tulung, T. E. (2022). *Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Studi Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Tahun 2021)*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 7(2), 36–44.

⁸ Arifin, Saru. 2022. "Abuse Of Human Rights In Myanmar: An Urgent Appeal To Reinterpret The ASEAN Non-Interference Principle." *Human Rights In The Global South (HRGS)* 1 (2): 128–144.

oleh militer. Hal ini mencapai puncaknya pada kudeta 1 Februari 2021 yang dilakukan oleh Jenderal Min Aung Hlaing, yang kembali menggulingkan pemerintahan sipil dan menandai runtuhnya proses demokratisasi yang sebelumnya mulai terbentuk.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat periode reformasi politik, kekuatan militer tetap memiliki posisi dominan melalui struktur konstitusional, penguasaan lembaga negara, serta kontrol terhadap keamanan nasional. Akibatnya, prinsip-prinsip demokrasi seperti supremasi sipil, kebebasan politik, dan partisipasi rakyat tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, kudeta 2021 juga memperburuk kondisi negara dengan memicu krisis politik, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang berkepanjangan. Protes masyarakat yang meluas dibalas dengan tindakan represif, sehingga memperdalam konflik antara pemerintah militer, kelompok etnis, dan gerakan pro-demokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Myanmar masih berada dalam kondisi rapuh dan belum terkonsolidasi.

Dominasi militer menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya sistem demokrasi yang stabil, sehingga proses transisi politik di Myanmar cenderung mengalami stagnasi dan siklus kemunduran yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggarani, M. (2008). *Perjuangan Anti Kolonialisme Burma*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Brahmantyo, & Soeparyo. (1977). *Sejarah Asia Tenggara Jilid II*. Malang: IKIP Malang.
- Nordlinger, E. A. (1990). *Militer Dalam Politik: Kudeta Dan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Steinberg, D. I. (2001). *Burma: The State Of Myanmar*. Washington, DC: Georgetown University Press.

Artikel in Press :

- The Guardian Myanmar Conflict Analysis (2025). *Myanmar Civil War: A Quick Guide To The Conflict*.
- Reuters Myanmar Military News (2026). *Myanmar Military Steps Up Fight For Strategic Regions*. <https://www.reuters.com/world/china/myanmar-military-steps-up-fight-rare-earth-area-border-routes-2026-05-25/>

Jurnal :

- Arifin, Saru. 2022. "Abuse Of Human Rights In Myanmar: An Urgent Appeal To Reinterpret The ASEAN Non-Interference Principle." *Human*

- Rights In The Global South (HRGS)
1 (2): 128–144.
- Huang, R. L. (2017). Myanmar's Way To Democracy And The Limits Of The 2015 Elections. *Asian Journal Of Political Science*, 25(1), 25–44.
- Irewati, A. (2016). Myanmar Dan Matinya Penegakan Demokrasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 4(1), 5–17.
- Kipgen, N. (2021). The 2020 Myanmar Election And The 2021 Coup: Deepening Democracy Or Widening Division? *Asian Affairs*, 52(1), 1–17.
- Rugian, F. E., Niode, B., & Tulung, T. E. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Studi Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2), 36–44.
- Saputra, A. A., & Dewi, E. (2025). Peranan Militer Dalam Konflik Internal Myanmar Pada Tahun 2017–2022. *Indonesian Journal Of International Relations*, 9(1), 80–96. <https://doi.org/10.32787/ljir.v9i1.644>
- Sultani, Z. I. M., Et Al. (2023). Memaknai Pasang Surut Berdemokrasi Di Myanmar (1962–2021) Dan Konteksnya Bagi Pendewasaan Demokrasi ASEAN. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 19(1), 40–51.
- Yasa, K. P. (2022). Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 103–110.